

Tata Kelola Entrepreneur; Alternatif Pengembangan Madrasah *Free Cost* dan Mandiri di MTs Negeri 3 Pamekasan

Mohammad Holis¹

¹Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Pamekasan
(holismad@gmail.com)

ABSTRAK

Implementasi dan hasil dari Tata Kelola Entrepreneur; Alternatif Pengembangan Madrasah *Free Cost* dan Mandiri di MTs Negeri 3 Pamekasan dalam memberdayakan seluruh potensi yang ada di lingkungan Madrasah dan masyarakat sekitar Madrasah dengan target capaian: pertama, teraktualisasi akhlak kepada Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitarnya. Kedua, meningkatkan prestasi belajar siswa baik akademik maupun non akademik. Ketiga, tata kelola kewirausahaan; sebagai alternatif pengembangan madrasah gratis. Keempat, menjadikan madrasah sebagai tempat belajar masyarakat tanpa terbelenggu oleh stratifikasi sosial dan ekonomi karena adanya biaya pendidikan gratis dengan jaminan keberlangsungan pembelajaran yang baik dan prestasi yang gemilang. Langkah strategis yang dilakukan MTs Negeri 3 Pamekasan dalam mewujudkan Tata Kelola Entrepreneur; Alternatif Pengembangan Madrasah *Free Cost* dan Mandiri di MTs Negeri 3 Pamekasan adalah dengan memanfaatkan potensi uang jajan yang dibawa siswa ke madrasah, dan mempromosikan produk literasi Madrasah.

Kata Kunci: Madrasah, Entrepreneur, *Free Cost*, Pendidikan, Mandiri

ABSTRACT

Implementation and outcome of entrepreneurial governance; alternative development of a free and independent cost madrasa in MTs Negeri 3 Pamekasan in empowering all potentials in the Madrasah environment and the community around Madrasah with target achievements: *first*, the actualization of morals to God, fellow humans, and the natural surroundings. *Second*, improve student learning achievement both academic and non academic. *Third*, entrepreneurial governance; as an alternative to the development of free cost madrasah. *Fourth*, making madrasa a place for learning without being shackled by social and economic stratification because of free cost education with guaranteed continuity of good learning and glorious achievement. Strategic steps taken by MTs Negeri 3 Pamekasan in realizing Entrepreneur Governance; Alternative Development of Madrasah *Free Cost* and independent in MTs Negeri 3 Pamekasan is to utilize the potential of pocket money brought by students to madrasah, and to promote Madrasah literacy products.

Key Words: Madrasah, Entrepreneur, *Free Cost*, Education, independent

PENDAHULUAN

Pembiayaan pendidikan pada madrasah/sekolah adalah bagian penting dalam pengelolaan program pembelajaran untuk memformulasi dan mengoperasionalkan madrasah/sekolah secara mandiri, karena pembiayaan pendidikan merupakan salah satu bagian dari standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh madrasah/sekolah sebagai institusi yang bertanggung terhadap penyelenggaraan dengan kualitas pendidikan yang baik dan representatif (Salamah, 2014; Levin, 1987).

Variasi pembiayaan pendidikan di madrasah/sekolah tergantung bagaimana pengelola madrasah/sekolah melakukan perencanaan dalam membiayai proses pembelajaran dan pendidikannya menuju madrasah/sekolah yang berkualitas dan beprestasi dengan peningkatan hasil belajar yang lebih baik, karena kondisi geografis, sosial, ekonomi dan budaya pendidikan masyarakat sekitar madrasah/sekolah, juga mempengaruhi proses pengelolaan madrasah/sekolah dari sisi standar pembiayaan pendidikan.

Setiap kebijakan yang mengatur tentang pembiayaan pendidikan di madrasah/sekolah akan selalu disosot baik pemerintah sebagai penentu kebijakan melalui regulasi maupun pihak madrasah/sekolah yang melaksanakan kebijakan tersebut, karena dianggap memanfaatkan pengelolaan pendidikan sebagai alat dan media untuk menjadikan madrasah/sekolah sebagai lahan bisnis baru yang menguntungkan dari sisi pembiayaan pendidikan yang kemudian dibebankan kepada wali murid yang bertanggung jawab terhadap pendidikan putra putri mereka (Fattah, 2008; Djamarah, 1994).

Tanggung jawab pembiayaan pendidikan yang tidak melulu menjadi bagian tanggung jawab pemerintah, merupakan sebuah metode untuk menghindari membengkaknya biaya pendidikan yang hanya dibiayai dengan APBN, dimana seharusnya masyarakat atau wali murid secara tidak langsung juga bertanggung jawab terhadap biaya penyelenggaraan pendidikan, karena terkait dengan hak wali murid dan murid untuk dapat memilih madrasah/sekolah untuk pendidikannya yang nantinya akan berdampak terhadap *social benefit* secara keseluruhan (Wiseman, 1987; Woodhall, 1987)

Madrasah/sekolah memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat kualitas pembelajarannya untuk memberikan jaminan mutu kepada masyarakat dan wali murid secara spesifik, bahwa pengelolaan pendidikan di sekolah/madrasah tidak asal-asalan dan bisa dipertanggung jawabkan, sehingga kesan pendidikan mahal dengan kualitas yang baik akan dengan sendirinya terkikis oleh zaman dan tidak lagi menjadi trend masyarakat saat ini, apabila tata kelola *entrepreneur* madrasah/sekolah dalam memanfaatkan potensi diri madrasah/sekolah untuk bisa menjadi madrasah *free cost* dan mandiri.

Pemanfaatan potensi diri yang dimaksud disini adalah pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia madrasah/sekolah disesuaikan dengan situasi, kondisi serta keadaan madrasah/sekolah, baik dari sisi tingkatan madrasah (RA/MI/MTs/MA) atau dari sisi letak geografis (*perkotaan, pedesaan, perbatasan dan sejenisnya*), atau sisi budaya dan sosial lingkungan yang mempengaruhi keberadaan madrasah dan sekolah (Narsoyo, 2010; Peterson, 2009; Siregar, 2000).

Kemudian apabila dilihat dari sisi sumber daya manusia madrasah/sekolah, yakni bagaimana sebenarnya seorang kepala madrasah/sekolah sebagai manager di madrasah/sekolah itu, harus berani melakukan terobosan untuk mendorong tata kelola *entrepreneur* menjadi *basic* pemikirannya agar madrasah/sekolah menjadi mandiri dan *free cost* bagi seluruh elemen masyarakat dan wali murid, sehingga tidak bergantung pada pemerintah dalam pembiayaan pendidikannya (Zais, 1976; Djamarah, 1994; Fattah, 2008). Dalam arti bahwa seorang kepala madrasah tidaklah berpangku tangan dan hanya menunggu Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan bantuan yang dikemas dengan Bantuan Komite Madrasah (*Tuan Komad*).

Pembiayaan pendidikan di madrasah/sekolah merupakan sebuah proses pelaksanaan manajemen, administrasi dimana ada pendapatan, pembiayaan pendidikan dan pengeluaran merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sehingga biaya pendidikan jika hanya mengandalkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan sangat memberatkan bagi penyelenggara pendidikan di madrasah/sekolah, jika tidak diimbangi dengan tata kelola *entrepreneur* yang baik dengan cara melihat potensi diri, dari madrasah/sekolah yang menjadi konsen pengembangan pendidikan.

Levin (1987) menyatakan bahwa ada beberapa istilah yang biasa digunakan untuk pembiayaan di madrasah/sekolah yakni sebagai berikut, *school income, school expenses, capital and current costs*. Sehingga dalam pengelolaannya madrasah/sekolah tidak hanya mengandalkan satu sumber untuk membiayai pendidikan, dan juga tidak mengandalkan orang tua dengan cara meminta melalui komite, akan tetapi menggunakan tata kelola *entrepreneur* yang baik di madrasah/sekolah untuk mendapatkan *income pasif* non BOS untuk pengelolaan pendidikan di madrasah/sekolah.

Mahalnya biaya pendidikan pada madrasah dan sekolah yang dianggap *benefid* dan sarat akan prestasi, menjadi penyebab munculnya jarak dan status sosial masyarakat dalam menyekolahkan putra putri masyarakat pada lembaga pendidikan disebabkan karena terbatasnya kemampuan finansial orang tua untuk membiayai pendidikan putra putri mereka.

Madrasah negeri di Jawa Timur misalnya yang dianggap madrasah/sekolah *benefit* dengan *cost* yang cukup tinggi dalam pembiayaan pendidikan yang ditanggung oleh orang tua peserta didik, ini merupakan contoh segelintir dari sekian banyak madrasah/sekolah di Indonesia yang memiliki tarif pembiayaan pendidikan yang cukup tinggi dan tidak bisa dijangkau oleh orang tua

yang memiliki keterbatasan ekonomi, dan masih ada anggapan bahwa madrasah yang berprestasi dan *benefit* adalah madrasah mahal dan biaya pendidikan tinggi yang ditanggung oleh orang tua.

Fakta diatas menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan yang tinggi di Indonesia belum terbebas dari belenggu perencanaan biaya pendidikan yang tidak didasari alur pikir dan tata kelola *entrepreneur* kepala madrasah dan sekolah yang seharusnya mencari cara dan metode agar *cost* pendidikan yang tinggi bisa dicarikan solusi dan tidak selamanya bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sumbangan orang tua melalui *bayang-bayang* komite madrasah dan sekolah untuk berlindung dan melegalisasi pungutan, dan bahkan berlindung dibalik regulasi yang seharusnya tidak perlu diterbitkan agar terbebas dari jeratan auditor yang sengaja mencari alternatif biaya pendidikan mahal tanpa memungut dari orang tua dengan dalih apapun.

Tata kelola pendidikan mahal akan menjadi murah dan bahkan *free cost education* apabila tidak mengandalkan pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS), akan tetapi juga bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan potensi madrasah/sekolah, diawali dengan menghitung potensi income melalui uang saku (*pocket money*) peserta didik yang hadir ke madrasah dan sekolah untuk dicarikan cara, dan metode agar madrasah dan sekolah mampu memberikan kontribusi *income* non BOS pada madrasah dan sekolah sebagai biaya tambahan pengelolaan madrasah yang dianggap mahal.

Prestasi dan pendidikan berkualitas yang selama ini hanya dilabeli bagi madrasah dan sekolah yang mahal dan dengan *high cost* dari orang tua, akan tergeser dengan sendirinya apabila madrasah dan sekolah, mengembangkan tata kelola *entrepreneur* dengan target income non BOS untuk membiayai pendidikan dengan *high cost* tanpa membebani orang tua dalam implementasi pendidikan putra-putrinya, sehingga akan muncul kesetaraan dalam menempuh pendidikan yang berkualitas dengan *free cost and independent education*.

Kesetaraan yang dimaksud adalah bagaimana agar masyarakat tidak dilihat dari *stratifikasi sosial ekonomi* apapun, sehingga semua elemen masyarakat secara umum akan dapat melanjutkan pendidikan yang berkualitas dengan prestasi yang baik, kesetaraan itulah yang harus terus diperjuangkan untuk menjadikan pendidikan di Indonesia menjadi pendidikan yang maju dengan kualitas pendidikan yang baik, tanpa membebani biaya dan *education high cost* bagi orang tua. Sehingga semua anak usia sekolah akan memiliki kesempatan yang sama dalam menempuh pendidikan yang berkualitas dengan prestasi yang baik, dan pasti, serta harus diyakini tidak akan terjadi lagi kesenjangan pendidikan antara status sosial dan ekonomi dalam dunia pendidikan, dan madrasah/sekolah akan mandiri serta tidak bergantung kepada siapapun dalam pembiayaan pendidikannya.

Sejalan dengan statemen diatas dapat dinyatakan bahwa tata kelola *entrepreneur* di madrasah dan sekolah akan menjadi jawaban dalam ikut menginspirasi *education high cost* agar dapat menjalankan pembelajaran yang berkualitas dan prestasi yang baik pula. MTsN 3

Pamekasan, berupaya untuk menjadi Madrasah *free cost* (Gratis) dan mandiri dengan prestasi yang Gemilang, sebagai jawaban dan alternatif pengembangan pendidikan abad 21, oleh karena itu MTsN 3 Pamekasan pada simposium nasional guru madrasah ini, mengangkat tema “*Tata Kelola Entrepreneur; Alternatif Pengembangan Madrasah Free Cost dan Mandiri di MTs Negeri 3 Pamekasan*”.

Kajian Teoritik Tata Kelola Entrepreneur di Madrasah

Filosofi *ruh al-jihad wa al-dakwah*, dalam pengembangan tata kelola *entrepreneur* sebagai alternatif pengembangan madrasah *free cost*, dimana semua komponen dan elemen madrasah (*pendidik, tenaga pendidik, peserta didik*) dan stakeholder (*wali peserta didik, tokoh pendidikan, serta masyarakat sekitar*) secara umum memahami bahwa pemecahan masalah di madrasah ini harus dikuatkan dengan prinsip-prinsip jihad dan dakwah islamiyah oleh para pemangku kebijakan yang memiliki kekuasaan dalam melakukan kebijakan dengan menekankan pada konsep IKHLAS sebagai jargon yang implementatif dalam mengatasi semua persoalan di madrasah termasuk persoalan pembiayaan pendidikan yang semakin mahal dan menjadi masalah klasik.

Konsep *ruh al-jihad¹ wa al-dakwah²* ini, dianggap ampuh secara implementatif karena kemudian semua elemen (pemerintah, pengasuh, kepala, guru dan masyarakat) di madrasah akan melakukan kegiatan apapun tanpa pamrih dengan didorong profesionalisme kerja yang baik, tanpa terjebak dengan rutinitas belaka, termasuk persoalan tata kelola *entrepreneur*, dalam pengembangan madrasah *free cost* sebagai sebuah alternatif menyelesaikan solusi pembiayaan pendidikan yang kian mahal dan sulit dicarikan alternatif jalan keluar.

Max Weber, (1968)³ sosiolog terkenal menguraikan bahwa kewenangan kepala madrasah sebagai manager di madrasah/sekolah, dalam menentukan kebijakan

¹ Kata bahasa Arab yaitu Jihad yang dikemukakan dalam ayat Al-Quran S. 29 Al-Ankabut:69, ini diterjemahkan sebagai ‘berjuang.’ Kata Jihad itu memang secara relatif pendek sekali tetapi implikasinya luar biasa dalam masyarakat Islam secara keseluruhan dan dalam kehidupan pribadi seorang Muslim. Jihad sebagaimana diperintahkan dalam Islam bukanlah tentang membunuh atau dibunuh tetapi tentang bagaimana berjuang keras memperoleh keridhaan Ilahi. Baik individual mau pun secara kolektif, Jihad merupakan suatu hal yang esensial bagi kemajuan ruhani.

² Dakwah adalah suatu proses penyampaian, ajakan atau seruan kepada orang lain atau kepada masyarakat agar mau memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama secara sadar, sehingga membangkitkan dan mengembalikan potensi fitri orang itu, dan dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Hakekat yang paling penting adalah adanya keyakinan atau kepercayaan bahwa Allah hanya satu dan tiada satu pun yang dapat menyamai-Nya, sehingga mau melaksanakan perintah-Nya

³ S.N. Eisenstadt, ed., Max Weber on Charisma and Institusi Building, (Chicago : University of Chicago Press, 1968), hlm 46.

pengelolaan pendidikan, termasuk persoalan pembiayaan pendidikan di madrasah/sekolah setidaknya ada tiga jenis kewenangan yakni sebagai berikut: *pertama: traditional authority*, yakni suatu kewenangan tradisional yakni kewenangan yang mendasarkan pada azas saling percaya antara penentu kebijakan yang pemerintah dengan pelaksana dan penyelenggara pendidikan yakni kepala madrasah, dan kewenangannya hanya dilandasi dengan tradisi dan tradisi itu dianggap wajar dan harus dihormati, dimana hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menyebutkan bahwa *al-muhafadzatu alal qadimis sholeh wal akhdzu bil jadidil ashlah* (memelihara sesuatu yang baik meskipun lawas, dan menjalankan/mengambil yang baru yang lebih baik), (Muhlis, 2016), *kedua: charismatic authority* yakni suatu kewenangan kharismatik yang mendasarkan pada keunikan kemampuan dalam pengelolaan pendidikan yakni menggunakan kekuatan mistik serta kemampuan religiusitas pemimpin dalam mengelola lembaga pendidikan dan sejalan dengan hadits nabi yang berbunyi "*la tha'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq*" (jangan kalian taat kepada makhluk Allah dalam bermaksiat kepada Allah) (Muhlis, 2016). *ketiga: rational-legal authority* yakni sebuah kewenangan yang rasional secara hukum dan berdasarkan kepercayaan pada kerangka hukum yang rasional, yang menjadi pijakan seorang pemimpin pendidikan yakni kepala madrasah/sekolah, yang titik tekannya bukan ada sumber daya manusianya, melainkan pada koridor hukum yang melandasi setiap tindakan dalam menentukan kebijakan pengelolaan pembiayaan pendidikan di madrasah/ sekolah, dan ini sejalan dengan ungkapan berbahasa arab sebagai berikut *alhaqqu bila nidzaamin yughalibul batin binidzaamin* (Muhlis, 2016). Ketiga kewenangan inilah yang menjadi arah dan kebijakan bagi pemerintah, pengasuh/ketua yayasan dan kepala madrasah/sekolah, untuk mengelola dan mengatur tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan kewenangannya untuk mengarahkan dan mengelola pendidikan dan memposisikan diri untuk memecahkan persoalan pendidikan, termasuk persoalan pembiayaan pendidikan yang semakin hari semakin mahal.

Dorongan prinsip *jihad* dan *dakwah* dalam dunia pendidikan, akan menghasilkan *paradigma militan* bagi pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik. Karena setiap tindakan yang dilakukan di madrasah dan sekolah atau di luar madrasah dan sekolah akan selalu dikaitkan dengan kehidupan setelah mati yakni kehidupan akhirat, dengan imbalan surga dan ancaman neraka, dan tidak lagi terjebak pada pragmatisme pendidikan yang selama ini ada (Zais, 1976).

Sehingga inspirasi dan inovasi yang dilakukan madrasah dan sekolah akan berujung pada konsep lestari, kontinyu dan berkelanjutan sehingga Pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik tidak hanya berfikir sesaat tentang kenikamatan dunia saja, melainkan berfikir tentang kenikamatan yang lebih abadi yakni akhirat, sehingga dalam setiap melakukan tindakan apapun di madrasah tidak mengharap imbalan kecuali imbalan pahala dan tentu memiliki nilai ekonomis (tidak oportunistik) yang tinggi dalam membangun dan mengembangkan madrasah dan sekolah melalui tata kelola *entrepreneur*, sebagai alternatif pengembangan madrasah *free cost* dan mandiri di MTs Negeri 3 Pamekasan. Karena madrasah tidak lagi mengeluarkan *eskra cost* dalam membiayai inovasi yang dilakukan oleh madrasah, bahkan lebih banyak pada konsep *watawasauhil haq, watawa saubis sabri*.

Potensi *Pocket Money* Peserta Didik dan Pemanfatannya

Potensi menurut bahasa memiliki arti kemampuan, sedangkan menurut istilah dalam tulisan ini, potensi merupakan suatu kemampuan sumber daya madrasah yang dapat dikembangkan agar bernilai dalam proses pengembangan masa depan madrasah/sekolah, setidaknya potensi uang saku (*pocket money*) yang dibawa peserta didik di madrasah/sekolah merupakan potensi besar yang dapat dikembangkan melalui tata kelola *entrepreneur* yang kemudian dapat membiayai pendidikan tanpa harus membebani wali murid dengan berlandung di balik Komite madrasah/sekolah (Ibrahim, 2010).

Sedangkan uang saku (*pocket money*), adalah uang atau dana yang dibawa oleh peserta didik sebagai bekal untuk berbelanja di madrasah/sekolah yang diberikan oleh orang tua/wali murid, baik dimanfaatkan untuk transportasi ke madrasah/sekolah, belanja makanan/snack, belanja buku, alat tulis atau bahkan di tabung untuk kepentingan pendidikan peserta didik yang bersangkutan, dan bahkan kebutuhan lain yang sifatnya sederhana, karena umrahnya uang saku yang dibawa peserta didik bervariasi disesuaikan dengan kemampuan orang tua/wali murid sebagai tanggung jawab materiel kepada putra-putrinya (Ibrahim, 2010; Fattah, 2008).

Potensi uang saku (*pocket money*) akan menjadi kekuatan madrasah/sekolah apabila dimanfaatkan melalui tata kelola *entrepreneur* yang baik oleh kepala madrasah/sekolah sebagai manager dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan di madrasah/sekolah.

Potensi *pocket money* di MTs Negeri Pamekasan, diartikan sebagai sebuah sumber daya yang belum maksimal di dimanfaatkan dan dikelola sesuai dengan kebutuhan sehari-hari peserta didik, sehingga sejak tiga tahun terakhir berupaya agar potensi *pocket money* menjadi perhatian khusus agar setidaknya madrasah dan sekolah mendapatkan *income pasif* tanpa harus memungut kepada orang tua/wali murid dengan berlandung dibawah komite, yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembiayaan pendidikan di madrasah dan sekolah berdampingan dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sehingga bisa *share profit* pembiayaan tata kelola *entrepreneur* melalui penyediaan bahan kebutuhan sehari-hari peserta didik dalam rangka menyerap *pocket money* yang jumlahnya tidak sedikit (Fattah, 2008).

Potensi *pocket money* peserta didik di MTs Negeri 3 Pamekasan, dilihat disisi kuantitas cukup menggiurkan untuk dikelola dan menjadikan madrasah mandiri dalam pembiayaan sehingga pelayanan *free cost education* bisa di berikan kepada peserta didik dengan memanfaatkan *share profit* dari penjualan beberapa unit usaha baik yang dimiliki oleh madrasah dan sekolah atau yang dikelola oleh masyarakat sekitar madrasah yang dapat memberikan *income pasif* bagi madrasah dan sekolah sebagai *income non bos*, adapun potensi data *pocket money* peserta didik MTs Negeri 3 Pamekasan pada tahun pelajaran 2019/2020 yang dapat dikelola sebagai mana tabel 1.1.

Tabel 1.1
Data *Pocket Money* Peserta Didik Tahun Pelajaran 2019/2020

NO	JUMLAH				
	POCKET MONEY	PESERTA DIDIK	PER HARI	PER BULAN	PERTAHUN
1	Rp 2.000	5	Rp 10.000	Rp 260.000	Rp 3.120.000
2	Rp 3.000	5	Rp 15.000	Rp 390.000	Rp 4.680.000
3	Rp 4.000	7	Rp 28.000	Rp 728.000	Rp 8.736.000
4	Rp 5.000	489	Rp 2.445.000	Rp 63.570.000	Rp 762.840.000
5	Rp 6.000	15	Rp 90.000	Rp 2.340.000	Rp 28.080.000
6	Rp 7.000	81	Rp 567.000	Rp 14.742.000	Rp 176.904.000
7	Rp 8.000	11	Rp 88.000	Rp 2.288.000	Rp 27.456.000
8	Rp 9.000	1	Rp 9.000	Rp 234.000	Rp 2.808.000
9	Rp 10.000	380	Rp 3.800.000	Rp 98.800.000	Rp 1.185.600.000
10	Rp 11.000	8	Rp 88.000	Rp 2.288.000	Rp 27.456.000
11	Rp 12.000	1	Rp 12.000	Rp 312.000	Rp 3.744.000
12	Rp 13.000	2	Rp 26.000	Rp 676.000	Rp 8.112.000

13	Rp 15.000	23	Rp 345.000	Rp 8.970.000	Rp 107.640.000
14	Rp 17.000	1	Rp 17.000	Rp 442.000	Rp 5.304.000
15	Rp 20.000	24	Rp 480.000	Rp 12.480.000	Rp 149.760.000
16	Rp 25.000	1	Rp 25.000	Rp 650.000	Rp 7.800.000
JUMLAH		1054	Rp 8.045.000	Rp 241.350.000	Rp 2.896.200.000

Catatan: Data *Pocket money* Siswa Tahun Pelajaran 2019/2020

Tabel 1.1 yang pertama dapat dijelaskan bahwa potensi *pocket money* peserta didik di MTs Negeri 3 Pamekasan sebagai berikut, dari jumlah peserta didik 1054 siswa, besaran *pocket money* peserta didik yang diberikan oleh orang tuanya sangat bervariasi dan di posisi yang paling banyak yakni peserta didik yang diberi *pocket money* oleh orang tuanya sebesar Rp. 5000,- sejumlah 489 peserta didik atau sekitar 46,39%, dan pada urutan besaran *pocket money* yang kedua yakni sebesar Rp. 10.000,- sejumlah 380 peserta didik atau sekitar 36,05% dari jumlah peserta didik. Sedangkan urutan ketiga *pocket money* sebesar Rp. 7000,- sejumlah 81 peserta didik atau sekitar 7,69% dari jumlah peserta didik. Dan urutan ke empat besaran *pocket money* sebesar Rp. 20.000,- sejumlah 24 peserta didik atau sekitar 2,28% dari jumlah peserta didik. Selanjutnya di urutan kelima besaran *pocket money* peserta didik sebesar Rp. 15.000,- sejumlah 23 peserta didik atau sekitar 2,18% dari jumlah peserta didik, dan urutan ke enam besaran *pocket money* peserta didik sebesar Rp. 6000, atau sekitar 1,42%, kemudian urutan ke tujuh besaran *pocket money* peserta didik sebesar Rp. 8000,- atau sekitar 1,04% dari jumlah peserta didik, dan sisanya besaran *pocket money* yang dibawa oleh peserta didik ke MTs Negeri 3 Pamekasan ada di bawah 1% dari jumlah peserta didik, yakni peserta didik yang membawa *pocket money* Rp. 2000,- *pocket money* Rp. 3000,-, *pocket money* Rp. 4000,-, *pocket money* Rp. 9000, *pocket money* Rp. 11.000,-, *pocket money* Rp. 12.000,- *pocket money* Rp. 13.000,- *pocket money* 17.000,- dan *pocket money* Rp. 25.000,-. Dan itulah sebenarnya potensi *pocket money* peserta didik di MTs Negeri 3 Pamekasan, ada banyak variasi jumlah besaran *pocket money* peserta didik yang dibawa ke madrasah yang tujuannya untuk dibelanjakan di madrasah dan sekolah dengan tujuan utama belanja makan, minum, snack dan alat tulis serta sarana pembelajaran yang ringan dan terjangkau dengan besaran *pocket money* yang dibawa, dan bahkan jika ada sisa *pocket money* peserta didik dapat menabungnya untuk kepentingan yang lebih besar.

Penjelasan *kedua* dari tabel diatas, yakni besaran jumlah *pocket money* yang berputar setiap hari di MTs Negeri 3 Pamekasan kisaran sejumlah Rp. 8.045.000,- (*delapan juta empat puluh lima ribu rupiah*), itu artinya kalau dihitung perputaran *pocket money* perbulan di MTs Negeri 3 Pamekasan akan menjadi Rp. 241.350.000,- (*Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), dan jika di hitung satu tahun, potensi *pocket money* peserta didik MTs Negeri 3 Pamekasan menjadi Rp. 2.896.200.000,- (*Dua Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*), jumlah perputaran *pocket money* yang cukup besar untuk ukuran madrasah yang melihat potensi *entrepreneur* yang bisa digali dan dimanfaatkan serta dicarikan cara agar madrasah dapat menerima manfaat dari besaran *pocket money* yang berputar di madrasah dan tidak hanya menjadi pengelola sampah makanan hasil dari limbah belanja *pocket money* peserta didik sehingga dapat membiayai biaya pendidikan di madrasah secara mandiri berdampingan dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Melihat data besarnya perputaran *pocket money* di MTs Negeri 3 Pamekasan, madrasah berupaya mengembangkan potensi pengelolaan *pocket money* menjadi sebuah “pasar⁴” yang dapat menguntungkan madrasah dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembiayaan pendidikan dengan konsep *free cost* bagi peserta didik dengan tidak mengenyamping pembelajaran yang professional dan prestasi yang tetap gemilang baik prestasi akademik dan non akademik.

Pemanfaatan *pocket money* (uang saku) peserta didik merupakan tanggung jawab keluarga untuk menyediakan dana bagi kebutuhan pendidikan putra-putri mereka, karena harus dipahami bahwa biaya pendidikan itu membutuhkan dana yang tidak sedikit adalah arti, bahwa orang tua/wali murid yang memiliki penghasilan cukup tinggi biasanya memberikan uang saku (*pocket money*) kepada putra-putrinya dengan nominal yang cukup besar, dan biasanya dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan kependidikan mereka baik dimadrasah/sekolah atau diluar lembaga pendidikan, karena biaya pendidikan itu tidak hanya yang berada di madrasah/ sekolah, karena bisa jadi orang tua/wali murid akan lebih mementingkann biaya pendidikan anak dibandingkan dengan biaya hidup mereka sendiri. Meskipun sebenarnya orang tua memberikan *pocket*

⁴ Penulis menggunakan istilah **PASAR**, karena uang saku yang di bawa oleh peserta didik ke madrasah adalah uang recehan antara Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah). Dan tidak menggunakan istilah **SUPER MARKET**, Karena asumsi penulis super market hanya di datangi oleh konsumen yang memiliki duit tebal dan banyak dan bahkan menggunakan kartu kredit, sedangkan di *pasar* uang recehan menjadi transaksi yang tidak melihat kelas ekonomi.

money kepada putra-putri mereka tujuan utamanya adalah agar mereka tidak kelaparan karena seharian mengikuti pelajaran di madrasah (Agus, 2010; Peterson, 2009; Siregar, 2000).

Pemberian *pocket money* oleh orang tua/wali murid kepada putra-putri mereka salah satu target manfaat yang akan mereka inginkan adalah bagaimana agar putra-putri mereka mampu mengelola keuangan secara mandiri dan transparan, sehingga orang tua berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada putra-putri mereka dengan memberikan uang saku (*pocket money*) yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan putra-putri mereka (Susanto, 2007; Headly, 1991; Azra, 2002).

Orang tua/wali murid memberikan *pocket money* kepada putra-putrinya pada saat belajar di MTs Negeri 3 Pamekasan, tidak hanya sekedar memberikan tanpa makna didalamnya, setidaknya orang tua/wali murid memberikan *pocket money* bertujuan untuk memberikan kepercayaan kepada putra-putrinya agar dapat mengelola keuangan yang terbatas dengan kebutuhan sebagai seorang pelajar, pengelolaan keuangan yang terbatas itu menjadi point awal bagi orang tua untuk melihat seberapa jauh perencanaan keuangan sederhana yang dilakukan oleh putra-putri mereka dalam mengimplementasikan kebutuhan sehari-hari sebagai pelajar di madrasah.

Peserta didik di MTs Negeri 3 Pamekasan, berupaya menyisihkan sebagian *pocket money*-nya untuk kepentingan menabung mereka yakni sekitar 37% dari jumlah peserta didik di madrasah yang *pocket money*-nya ditabung dengan nilai sekitar Rp. 1.071.720.000,- (*satu milyar tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*) setiap tahun, Karena yang dominan dari belanja peserta didik di MTsN 3 Pamekasan tetaplh point utama yakni untuk uang jajan (konsumsi) di madrasah yakni 58,93% dari jumlah peserta didik keseluruhan, atau senilai Rp. 1.706.640.000 (*satu milyar tujuh ratus enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*) setiap tahun. Dan ada pada urutan ke tiga yakni di manfaatkan untuk membayar parkir kendaraan yang disiapkan oleh warga sekitar madrasah yang bekerja sama dengan madrasah yakni sekitar 4,06% dari jumlah siswa atau senilai Rp. 117.624.000,- (*seratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah*) setiap tahun. Kemudian sisanya dimanfaatkan lain-lain oleh peserta didik yakni sekitar 0,01% dari jumlah peserta didik atau sekitar Rp. 216.000,- (*dua ratus enam belas ribu rupiah*) setiap tahun.

Dilihat dari data diatas dapat dijelaskan bahwa pemanfaatan *pocket money* peserta didik di MTsN 3 Pamekasan lebih dominan pada pemanfaatan untuk belanja konsumtif peserta didik, seperti belanja jajan, sarapan, makan siang, minuman dan sejenisnya. Itu artinya bahwa *pocket money* yang dibawa peserta didik dari sisi pemanfaatannya dapat dihitung sebagai *pocket money* yang memiliki potensi besar untuk bisa menjadi *income pasif* bagi madrasah, dengan catatan madrasah mampu menyiapkan semua kebutuhan yang dibutuhkan dalam pemanfaatan *pocket money* bagi peserta didik, sehingga tata kelola *entrepreneur* di madrasah harus sejalan dengan pemanfaatan *pocket money* peserta didik.

Tata Kelola *Entrepreneur* Menuju *Free Cost and Independent Education*

Entrepreneur atau lebih sering disebut sebagai wirausah adalah bentuk dan wujud kreatifitas dan inovasi yang ditunjukkan oleh manager madrasah/sekolah yakni kepala madrasah/sekolah dalam rangka melakukan terobosan dan pengembangan, yang salah satu tujuannya adalah meminimalisir ketergantungan biaya dan pengelolaan pendidikan kepada wali murid melalui inovasi dan kreasi tata kelola *entrepreneur*; sebagai alternative pengembangan madrasah *free cost* dan mandiri, sehingga kepada madrasah akan mencaeri peluang dan potensi madrasah untuk dikembangkan menjadi madrasah *free cost* dan mandiri tanpa bergantung pada wali murid/orang tua dengan berlindung dibalik komite madrasah atau bahkan bisa saja tidak bergantung pada BOS dan pemerintah (Marits, 2013).

Entrepreneur yang kemudian disebut kewirausahaan merupakan suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha atau suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan berbeda. Kewirausahaan merupakan gabungan kreatifitas, inovasi dan keberanian menghadapi resiko yang dilakukan dengan kerja keras untuk membentuk dan memulai usaha baru. Kewirausahaan menekankan pada aspek sikap dan perilaku sedang wirausaha menekankan pada orang yang memiliki sikap kewirausahaan (Wilmoth, 2016; Marits dan Brown, 2013).

Tata kelola *entrepreneur* di MTsN 3 Pamekasan yang dimaksud adalah upaya kreatif dari madrasah secara kolektif bersama semua komponen menggali potensi, seperti potensi *pocket money* peserta didik, potensi sumber daya alam sekitar madrasah, dan potensi diri sumber daya manusia yang melekat pada madrasah dengan cara mengembangkan unit usaha dalam berbagai bidang yang tujuan utamanya adalah

membayai operasional madrasah sehingga menjadi madrasah yang mandiri dari segi *finansial* dan *free cost* bagi peserta didik dari berbagai golongan dan kelas ekonomi, sehingga menghasilkan pendidikan yang berkualitas dengan prestasi yang dapat dipertanggung jawabkan dihadapan Allah dan masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan yang sesuai dengan harapan semuanya.

Tata kelola *entrepreneur* MTsN 3 Pamekasan adalah bagian pengembangan dan inovasi menyeluruh dari *brand* madrasah *edukotourism* yakni madrasah berbasis wisata edukasi dan literasi, hal ini mulai dikembangkan sejak tahun 2014 yang lalu, sehingga tata kelola *entrepreneur* ditargetkan mampu memberikan kontribusi terhadap pembiayaan pendidikan di MTsN 3 Pamekasan, melalui pengelolaan secara komperensif dan berkesinambungan, dengan melihat potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh MTsN 3 Pamekasan (Holis, 2019).

Inovasi pengembangan madrasah *edukotourism* dengan tata kelola *entrepreneur* dalam pembiayaan pendidikan, merupakan bagian dari pengembangan dan pengelolaan pendidikan menuju kemandirian pembiayaan pendidikan dan bahkan *free cost* untuk semua layanan pendidikan di MTsN 3 Pamekasan.

Kemandirin dalam pembiayaan seluruh penyelenggaraan pendidikan di MTsN 3 Pamekasan, merupakan upaya baik dan bersinergi antara semua elemen pengelola dan *stakeholder* dalam membangun madrasah, sehingga nilai *oportunity* dalam pengelolaan madrasah tidak lagi muncul, karena dilandasi dengan konsep *ruhul jihad wa dakwah* dalam pengelolaannya.

Tata Kelola *entrepreneur*, dengan rumah besar madrasah *edukotourism* di MTsN 3 Pamekasan, adalah memadukan konsep kebutuhan pasar dalam hal ini kebutuhan peserta didik dalam berbelanja di madrasah dengan produk yang dihasilkan peserta didik seperti produk daur ulang sampah, ekologi, literasi dan produk lain yang memiliki nilai jual yang tinggi sehingga tata kelola *entrepreneur* tidak hanya fokus pada menjual produk orang lain akan tetapi memasarkan produk sendiri sebagai hasil dari pembelajaran di MTsN 3 Pamekasan.

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar Madrasah

a. Parkir Masyarakat Berbayar

Bermula dari sebuah pemikiran polusi udara dan pencemarannya dilingkungan madrasah atas asap kendaraan bermotor didukung dengan Undang-undang lalu lintas

tentang Surat Ijin Mengemudi (SIM), semua melarang peserta didik untuk membawa kendaraan bermotor ke madrasah. Namun demikian koreksi terhadap kebijakan pelarangan membawa kendaraan bermotor berdampak terhadap kondusifitas madrasah, karena sekitar 30,76% peserta didik jarak dari rumah ke madrasah diatas 10 Km, dan tidak tersedianya angkutan umum yang dapat membantu peserta didik dan masyarakat, sehingga mengubah kebijakan dengan cara bekerja sama dengan masyarakat sekitar madrasah yang memiliki lahan kosong untuk bisa didibangun tepan parkir berbayar.

Adapun tempat parkir berbayar sampa saat ini sedikitnya ada 3 tempat parkir berbayar yakni parkir satu milik pak Huri dengan kapasitas sepeda motor ± 128 motor, parkir dua milik pak syarif ± 95 motor dan parkir tiga milik pak jasuli ± 120 motor, dengan omzet pertahun \pm Rp 98.784.000,-

Warung Masyarakat

Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Pamekasan yang bermula dari MTsN Sumber Bungur memiliki lahan sekitar 7000m² tanah waqaf dari masyarakat sekitar madrasah dengan nadzir pengasuh pendok pesantren sumber bungur, yang pada tahun 2013 diserahkan ke Kementerian Agama, sehingga sebagai madrasah yang berasal dari masyarakat, maka madrasah memberikan fasilitas kepada pewaqaf tanah untuk bisa berjualan disekitar madrasah. sedikitnya 8 kantin masyarakat yakni kantin, (1) Hj. Busiyah, (2) Hj Erna (3) Bu Suana (4) Bu Suri (5) Bu Arma (6) Bu Jasuli (7) Bu Sakim (8) Bu Jaka. Dua kantin madrasah (1) Kopmad Al-Farobi dan (2) Kantin Sehat, Serta 4 toko masyarakat yakni (1) Toko H Halili, (2) Toko Abd Azis, (3) Toko Sakim dan (4) Toko Pak Jaka. yang total omzetnya diperkirakan Rp. 1.656.000.000, /tahun.

b. Musholla dan Toilet Berbayar

Kampung pendidikan meruapakan salah satu program pemberdayaan masyarakat sekitar madrasah, yang orientasinya menjadi madrasah sebagai sumber inpsirasi bagi masyarakat sekitar dalam melaukan kegiatannya, termasuk bagaimana madrasah memanfaatkan Musholla masyarakat sekitar madrasah dan toiletnya untuk diberdayakan agar menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat sekitar madrasah. sedikitnya ada 7 musholla dan 14 kamar mandi/toilet yang bisa dimanfaatkan oleh pengunjung ke madrasah baik peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan maupun pengunjung lain yang sengaja hadir ke madrasah.

Musholla dalam konsep kampung pendidikan diberdayakan dengan tidak hanya dijadikan tempat sholat saja, melainkan juga menjadi tempat belajar, diskusi dan kegiatan pembelajaran lainnya bagi peserta didik dalam setiap momentum.

Dengan demikian maka keberadaan toilet/kamar mandi musholla merupakan suatu kenisyaaan yang harus di berdayakan agar berdaya guna dan tidak merugikan pemilik musholla, sehingga penggunaan toilet masyarakat untuk waga madrasah berbayar @Rp. 500,-/pakai. Dengan 10% income ke madrasah.

Dari 14 toilet musholla masyarakat sekitar madrasah dapat dirinci data sebagai berikut (1) Pak Syaifullah rata-rata dikunjungi 20 orang perhari dengan perolehan Rp. 2.880.000/tahun, (2) Pak Ahmad rata-rata dikunjungi 15 orang perhari dengan perolehan Rp. 2.160.000,-/tahun, (3) Pak Abd Halim (4) Pak Pak Huri, (5) Pak Mudhar, (6) Pak Jakfar, dan (7) Pak Moh Ra'ie rata-rata dikunjungi 10 orang per hari sehingga masing-masing mendapatkan perolehan Rp. 1.440.000,-/tahun.

c. Pemanfaatan dan Pemeliharaan Destinasi Wisata

Salah satu program pendukung Madrasah Edukotourism MTsN 3 Pamekasan, setiap hari jum'at ada program BERSAHABAT (*Bersih, Sehat, dan Bakti Sosial*). Dalam kegaitan ini Guru dan peserta didik dibagi tiga bagian yakni kelas VII, kelas VIII dan kelas IX (*peserta didik dan wali kelas*) dengan pembagian jadwal secara bergantian yakni (1) Bersih-bersih lingkungan/Bakti Sosial (2) Jalan-jalan Sehat dan (3) Senam Bersama. Dalam program itu juga menjadikan alat untuk melestarikan dan memelihara dengan cara membersihkan destinasi wisata bukit brukoh dan sekaligus merawatnya, sebagai sarana pembelajaran peserta didik diluar madrasah.

Kemudian saat ini sedang dirancang untuk memeliharaaan bukit sekkar yang berada di desa Palalang yang dihuni kera liar dan hampir punah, sehingga pelestarian terhadap kera-kera itu menjadi tanggung jawab bersama, karena peserta didik MTsN 3 Pamekasan sebagian berasal dari sekitar bukit sekkar

Income Dari Tata Kelola Entrepreneur

Madrasah yang baik adalah madrasah yang pembiayaan operasionalnya tidak hanya mengandalkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pemerintah, dan tidak memungut kepada wali murid dalam bentuk apapun, sehingga kompetensi

enterprenership kepala madrasah harus menjadi bagian yang tidak perpisahkan dari tanggung jawabnya dalam pengelolaan madrasah.

Madrasah Tsanwiyah Neneri 3 Pamekasan dengan konsep edukotourism, berupaya memberdayakan masyarakat sekitar melalui kampung pendidikan sumber bungur, dimana masyarakat sekitar akan merasa ketergantungan terhadap keberadaan madrasah dalam segala aspek kehidupan dan begitu juga sebaliknya madrasah mendapatkan manfaat dari masyarakat sekitar. Madrasah yang dapat merubah dan mempengaruhi masyarakat sekitar merupakan madrasah yang berbaur dengan masyarakat, dan mendapatkan income pembiayaan diluar dana BOS.

Kepala madrasah dalam hal ini berfungsi sebagai pengelola madrasah, harus melihat madrasah sebagai *pasar besar* dalam melihat perputaran keuangan di madrasah, data menunjukkan bahwa *pocket money* peserta didik di MTsN 3 Pamekasan pada tahun pelajaran 2019/2020 sebesar Rp. 2.896.200.000,-/Tahun, sehingga dengan dana sebesar itu harus dicarikan celah agar setidaknya madrasah mendapatkan manfaat atau bahkan income di luar BOS, dibawah ini akan dipaparkan sumber income Madrasah diluar BOS sebagai berikut:

a. Kantin Madrasah dan Sewa Kantin

Sedikitnya ada 10 kantin di MTsN 3 Pamekasan, dengan rincian 8 kantin masyarakat (*pemilik lahan waqaf dulu*), income didapat dari 2% perolehan setiap hari, dan 2 kantin madrasah dengan keuntungan 35% perolehan/hari. dari kantin-kantin itu madrasah mendapat income sekitar Rp. 293.328.000,-/tahun

b. Share Profit Parkir

Ada 3 lahan parkir berbayar masyarakat sekitar madrasah yang dapat menjadi mata pencaharian masyarakat sekitar madrasah yakni (1) parkir pak huri dengan kapasitas \pm 128 kendaraan, (2) parkir pak syarif dengan kapasitas \pm 75 kendaraan dan (3) parkir pak jasuli dengan kapasitas \pm 120 kendaraan. Pada setiap kendaraan (motor) yang parkir di tempat parkir masyarakat maka dikenakan tarif parkir Rp. 1000/hari, dari tarif itu madrasah mendapatkan income share profit 10%. Sehingga dalam satu tahun madrasah akan mendapatkan share profit dari parkir masyarakat sekitar Rp. 9.302.400,-/tahun.

c. Share Profit Wisata Bukit Brukoh

Bukit brukoh adalah destinasi wisata yang baru dikembangkan dan berada di desa Bajang Kecamatan Pakong, sekitar 3.5 km, dari MTsN 3 Pamekasan, income share profit dari destinasi wisata bukit brukoh didapat dari penjualan produk madrasah dan kuliner yang sengaja dijual di daerah wisata dimaksud.

d. Hasil Penjualan Produk Madrasah

Income hasil tata kelola *entrepreneur* madrasah selain BOS adalah penjualan produk-produk hasil karya siswa, guru yang dipasarkan melalui kantin, toko dan dinas koperasi kabupaten dan propinsi Jawa Timur.

Kesimpulan Konsep Tata Kelola Entrepreneur

Tulisan diatas memberikan salah satu cerminan keseriusan pengelolaan madrasah/sekolah untuk dapat menyelenggaraan pendidikan dengan biaya mandiri dan bahkan gratis kepada semua masyarakat yang membutuhkan sehingga tulisan ini disimpulkan sebagai berikut:

- a. Tata Kelola *Entrepreneur*; Alternatif Pengembangan Tsanawiyah *Free Cost* dan Mandiri di MTs Negeri 3 Pamekasan, bertumpu pada pengelolaan madrasah dengan basis *entrepreneur* untuk membiayai pendidikannya sehingga peserta didik yang hadir di madrasah tidak lagi dibebani dengan biaya yakni *Free Cost*
- b. Implementasi tata kelola *entrepreneur*; sebagai alternatif pengembangan madrasah *free cost* dan mandiri, merupakan sebuah terobosan dan alternatif bagi berlangsungnya pendidikan gratis dan berkualitas bagi masyarakat lebih-lebih masyarakat tidak mampu sebagai jawaban keresahan masyarakat secara umum terhadap biaya pendidikan yang kian mahal,
- c. MTs Negeri 3 Pamekasan akan menjadi *trickle down effect* dalam mengembangkan madrasah, karena setiap menjalankan program pengembangannya MTs Negeri 3 Pamekasan, merupakan memberdayakan sumber daya yang ada pada masyarakat sekitar madrasah, sehingga berhasil guna demi terciptanya masyarakat yang sejahtera sebagai imbas dari keberadaan madrasah yang memberikan efek ekonomi kepada masyarakat sekitar madrasah.
- d. Mengeklopasi sumber daya yang ada di madrasah dalam rangka menumbuh kembangkan kreatifitas dan inovasi bagi warga madrasah menuju madrasah mandiri

dan berkeadilan tanpa melihat kelas sosial ekonomi dalam mengembangkan skill dan kemampuannya di madrasah, sehingga akan menghasilkan produk yang berkualitas melalui pembelajaran yang professional, dan pada akhirnya akan melahirkan prestasi yang bemilang.

Saran dan Rekomendasi

- a. Madrasah yang memiliki inovasi dan terobosan yang baik dalam pengelolaan madrasah hendaknya diberikan payung hukum dalam pelaksanaan program berupa regulasi yang mengatur tentang inovasi pengelolaan madrasah secara komprehensif.
- b. Daya dukung pemerintah khususnya kementerian agama dalam memberikan support merupakan suatu keniscayaan yang harus terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, sehingga pengelola madrasah tidak ragu dalam berinovasi dalam pengembangan madrasah.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiwibowo S, (2007), *Etika Lingkungan*. Modul Kuliah Ekologi Manusia. Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia , Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Agus, (2010), *Sekolah Unggulan Lembaga Pendidikan Alternatif di Era Kompetitif*, Malang: UIN Maliki Press.
- Alma Haris, (2003), *Building Leadership Capacity For School*, Open University Press, Philadelphia.
- Al-Quran S. 29 Al-Ankabut:69.
- Anam, (2017), *Guru Pembelajar, Profil 25 Guru Inovatif*, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Azra, A. (2002). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta : Kompas
- Budiardjo, (2008), *Dasar-dasar ilmu politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Darmawan H.A, (2007), *Konsep-konsep Dasar dan isu-isu Kritis Ekologi Manusia*. Modul Kuliah Ekologi Manusia. Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Djamarah (1994), *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru*, Usaha Nasional, Jakarta.
- Fattah, (2008), *Pembiayaan Pendidikan: Landasan Teori dan Studi Empiris*, Jurnal Pendidikan Dasar, Nomor 09 April 2008.
- Gelsthorpe, (2003), *Educational Leadership and the Community*, Pearson Education, London
- Headlye, (1991), *Creating An Excellence School*. London: Routledge.
- Holis (2019), *Inovasi Madrasah Berbasis Edokotourism*, Penerbit Komentar, Banten
- Hopkins & Jackson, (2003), *Effective Leadership for School Improvement*, New York : Routledge Falmer.
- Ibrahim, (2000), *Al-Manahij Al-Mu'ashirah*, Mansya'ah Al-Ma'arif, Iskandariyah.
- Ibrahim, (2010) *Al-Marji' fi Shu'ubaa' Al-Ta'allum*, Maktabah Al-Anglo AL-Misriyah, Kairo, 2010.
- Kemp, (1985), *Planing and Producing Intructuional Media, Fifth Edition*, Harper & Row Publisesher, New York.
- Levin G,(1987). *Empowerment: An Emerging Mental Healt Technology*. J Primary Prevention, USA.
- Marits dan Brown (2013), *Enhancing Entrepreneur self-efficacy through vocational entrepreneurship education programmes*, Journal of Vacational Education & training
- Modul II Praktik yang baik dalam pembelajaran, USAID Prioritas hal;219
- Muhlis, (2016) *Kebijakan Pemerintah dalam pengembangan kurikulum dengan model sisten Kredit Semester di Madarsah*, Volume 11 Nomor 1 Juni 2016, Tadris: Jurnal Pendidikan Islam, hal. 126.
- Muhlis, (2018) *Hegemony of Student Resistances Toward Teacher in Arabic Learning*, *Educational Research International*, Vol. 7 (3) Agust 2018, Pakistan: SAVAP Internasional, hal. 29.
- Narsoyo, (2010), *Pengembangan Kurikulum Pendidikan*, Refika Aditama, Bandung

- Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata.
- Peterson, (2009), *The Shaping School Culture, Pitfalls, Paradoxes, & Promises*, Published by Jossey-Bass, San Francisco.
- Prayitno, (2006), *Psikologi Perkembangan Remaja*, Padang: Angkasa Raya, hal 100.
- Puslitbang pada Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan RI, 2001, *Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Jakarta.
- S.N. Eisenstadt, ed., *Max Weber on Charisma and Institution Building*, (Chicago : University of Chicago Press, 1968), hlm 46.
- Salamah, (2014), *Tashmim Al-Tadris*, Dar Al-Khariji li Al-Nasyr wa Al-Tauzie', Riyadl
- Siregar, (2000) *Efektifitas Penyelenggaraan Sekolah Model: Study tentang MAN 2 Model Padang sidempuan*, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Jakarta.
- Soenarya, (2000), *Pengantar Teori Perencanaan Pendidikan: Berdasarkan Pendekatan Sistem*. Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa
- Special Report, (2002), *The U.S. Ecotourism Market*, ETO.
- Susanto, (2007), *Jurnal Karsa: Madurologi I*, Volume 11, No 1.
- Trimantara, (2007) *Sekolah Unggulan: Antara Kenyataan dan Impian*, Jurnal Pendidikan Penabur, Vol. 6, No.08 Juni.
- Wilmoth, 2016, *The Arrival of The Immigrant Entrepreneur*, Economic Research Series, SBA, Washington DC.
- Wiseman, (1987), *Research and Studies*, New York: Pergamon Press.
- Woodhall, (1987). *Education Finance in Indonesia: Issues and Model*, unpublished report for UNICEF Office at Indonesia.
- Zais, (1976), *Curriculum, Principles, and Foundation* (New York: Harper and Row).